



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

Nomor : 1452/DJMT/HM1.1/IX/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Hal : Penugasan Hakim sebagai Responden dalam Survei
Pembangunan Indeks Integritas Hakim Tahun 2026

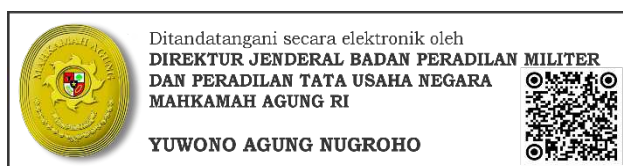
Jakarta, 29 September 2026

Yth. 1. Para Ketua, Para Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi
pada Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Kepala/Ketua, Para Wakil Kepala/Wakil Ketua, Para Hakim
pada Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 270/SET/LI.04.03/09/2026 tanggal 17 September 2026 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Indeks Integritas Hakim Tahun 2026 pada Hakim Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, bersama ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menugaskan Saudara untuk menjadi responden dalam Survei/Wawancara Integritas Hakim Tahun 2026 dimaksud.

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh PT Ayaskara Nisita Synergy sebagai pelaksana survei dalam rangka membangun Indeks Integritas Hakim Tahun 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdri. Ami (0815 1012 5205) dan Sdr. Saeful (0812 3456 6155).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Komisi Yudisial RI;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial;
4. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI.



DAFTAR SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM SURVEI PEMBANGUNAN INDEKS INTEGRITAS HAKIM TAHUN 2026

NO	PROVINSI	PERADILAN MILITER	PERADILAN TATA USAHA NEGARA
1	Aceh	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
2	Sumatera Utara	Pengadilan Militer Tinggi I Medan	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
		Pengadilan Militer I-02 Medan	-
3	Sumatera Barat	Pengadilan Militer I-04 Padang	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
4	Riau	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
5	Sumatera Selatan	Pengadilan Militer I-05 Palembang	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
6	Kep. Bangka Belitung	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
7	Lampung	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
8	DKI Jakarta	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
9	Banten	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
10	Jawa Barat	Pengadilan Militer II-07 Bandung	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
11	Jawa Tengah	Pengadilan Militer II-08 Semarang	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
12	DI Yogyakarta	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
13	Jawa Timur	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
		Pengadilan Militer III-10 Surabaya	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
14	Bali	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
15	Nusa Tenggara Barat	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
16	Kalimantan Barat	Pengadilan Militer IV-14 Pontianak	-
17	Kalimantan Selatan	Pengadilan Militer IV-15 Banjarmasin	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
		-	-
18	Kalimantan Timur	Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan	Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
19	Sulawesi Selatan	Pengadilan Militer Tinggi V Makassar	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
		Pengadilan Militer V-17 Makassar	-
20	Sulawesi Utara	Pengadilan Militer V-19 Manado	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
21	Sulawesi Tenggara	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
22	Maluku	Pengadilan Militer V-20 Ambon	-
23	Papua	Pengadilan Militer V-22 Jayapura	-
24	Papua Barat	Pengadilan Militer V-21 Manokwari	-



Ditandatangani secara elektronik oleh
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI**
YUWONO AGUNG NUGROHO



